

## PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP BISNIS KONSTRUKSI INDONESIA

Yongki Alexander Tanne<sup>1)</sup>

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung  
Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Indonesia  
E-mail: [yongkitanne@yahoo.co.id](mailto:yongkitanne@yahoo.co.id)<sup>1)</sup>

### ABSTRAK

*Kenaikan anggaran infrastruktur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan harapan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur (APBN 2018). Hal ini sangat wajar karena memang tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai maka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional juga akan terhambat. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintah karena berdasarkan kajian awal diatas terlihat bahwa sesungguhnya belum ada pemerataan pembagian paket pekerjaan antara kontraktor besar, kecil dan menengah baik itu BUMN maupun swasta. Belum ada kajian yang komperhensif mengenai hasil pembangunan infrastruktur dan terbatasnya data yang dipublikasikan menyebabkan terbatasnya lingkup kajian dan umpan balik yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai regulator untuk melakukan perbaikan. Disisi lain, perlu dilakukan upaya-upaya pemerintah untuk membuat bisnis konstruksi di Indonesia berkembang dengan merata melalui perbaikan regulasi terkait pembagian kualifikasi dan klasifikasi maupun mengarahkan kontraktor kecil menjadi kontraktor spesialis..*

**Kata kunci:** *Infrastruktur , Bisnis Konstruksi*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

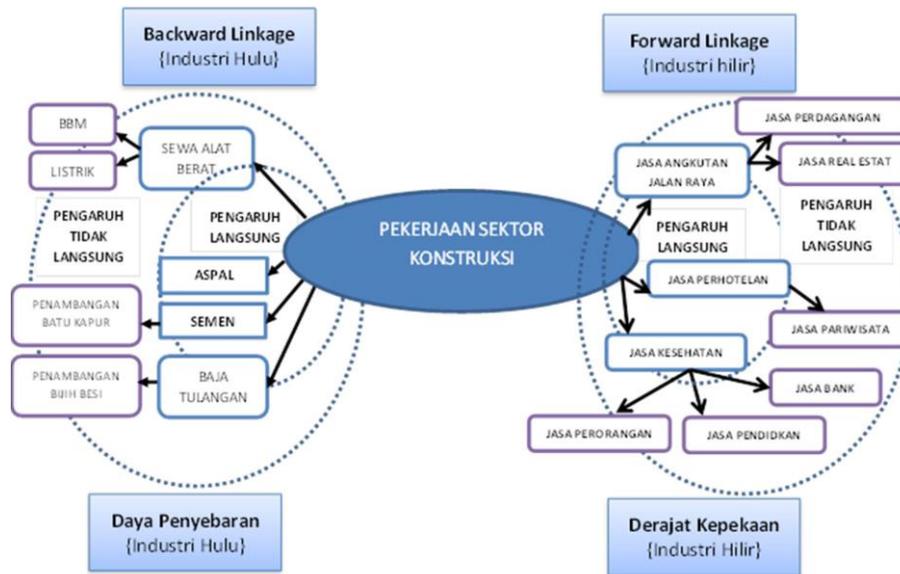
Pada masa pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur pemerintah meningkat sangat tajam. Hal ini ditujukan untuk melakukan pemerataan pembangunan khususnya untuk daerah di luar pulau jawa. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tabel 1, untuk tahun 2019 anggaran infrastruktur pemerintah naik menjadi Rp415,0 triliun atau naik 1,04% dari tahun sebelumnya. Apabila melihat perkembangan belanja infrastruktur pemerintah dari tahun 2013 sampai tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa pada anggaran infrastruktur pada tahun 2015 naik 65,5% dan kemudian naik untuk tahun-tahun berikutnya.

Kenaikan anggaran infrastruktur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan harapan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur (APBN 2018). Hal ini sangat wajar karena memang tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai maka pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi secara nasional juga akan terhambat.

**Tabel 1** Anggaran Infrastruktur Indonesia

Tahun	Anggaran Infrastruktur	Kenaikan (%)
2013	Rp155,9 T	7,2
2014	Rp154,7 T	-0,8
2015	Rp256,1 T	65,5
2016	Rp269,1 T	5,1
2017	Rp388,3 T	44,3
2018	Rp410,7 T	5,8
2019	Rp415,0 T	1,04



**Gambar 1.** Pola Pengaruh Sektor Konstruksi

Turun naiknya perkembangan sektor konstruksi dipengaruhi oleh iklim ekonomi dan sebaliknya kondisi ekonomi nasional juga sedikit banyaknya ditentukan oleh seberapa besar kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Perkembangan sektor konstruksi khususnya dalam pembangunan infrastruktur mendukung terciptanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan Infrastruktur memungkinkan peningkatan mobilitas masyarakat dan niaga, prasarana sanitasi kesehatan dan pendidikan serta fungsi – fungsi sosial lainnya juga menjadi lebih baik.

Disamping melihat tujuan anggaran infrastruktur pemerintah untuk pemerataan pembangunan, sebenarnya proyek infrastruktur pemerintah ini juga menjadi faktor yang mendorong sektor konstruksi untuk ikut terlibat di dalam proyek-proyek infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya bisnis konstruksi nasional baik yang melibatkan BUMN maupun swasta dapat berkembang dengan ikut terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang dikembangkan pemerintah.

### 1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan yang muncul dari penelitian ini adalah apakah sektor bisnis konstruksi ikut berkembang dengan arah kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari meningkatnya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah terhadap bisnis konstruksi di Indonesia melalui variabel Jumlah Perusahaan Konstruksi, Nilai Konstruksi, Nilai Pendapatan dan Pengeluaran serta Jumlah Paket Pekerjaan yang diperoleh.

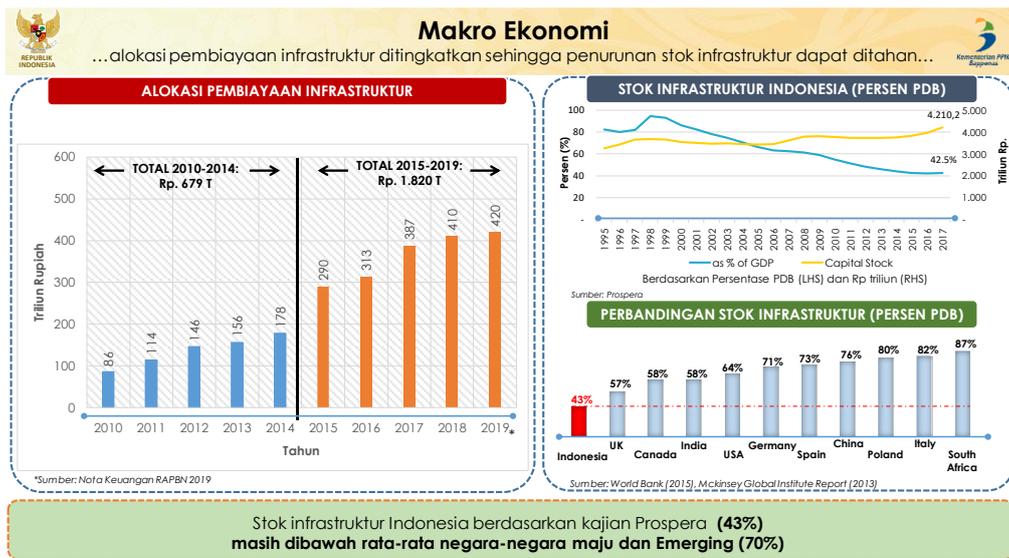
### 2. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder melalui website resmi instansi pemerintah terkait dan dibandingkan dengan sumber-sumber pemberitaan yang dapat dipercaya. Lingkupnya dibatasi kepada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan sektor bisnis konstruksi.

### 3. Analisis dan Pembahasan

#### 3.1 Arah Kebijakan Pemerintah

Arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program nawa cita untuk menjadikan infrastruktur menjadi dasar dari pembangunan di Indonesia bukan tanpa alasan. Berdasarkan kajian yang diterbitkan prospera, stok infrastruktur Indonesia masih berada dibawah rata-rata negara maju dan berkembang lainnya sehingga sulit untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mengundang investasi ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur selain mencari sumber pendanaan lain.



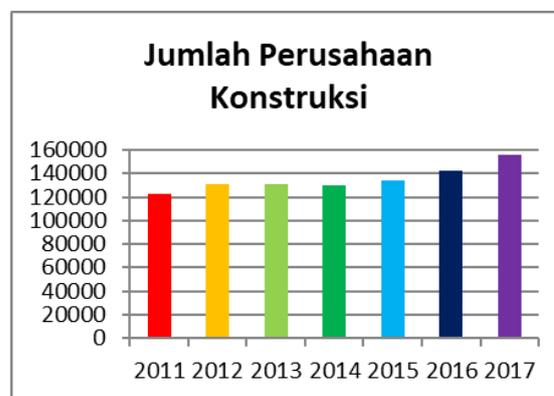
Gambar 2. Makro Ekonomi Indonesia

Dengan anggaran infrastruktur yang terus meningkat, pemerintah perlu mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama lima tahun belakangan. Dengan pengaruh pembangunan infrastruktur yang luas, banyak indikator yang dapat dijadikan acuan salah satunya pertumbuhan bisnis konstruksi.

### 3.2 Perkembangan Bisnis Konstruksi

#### 3.2.1 Jumlah Perusahaan Konstruksi

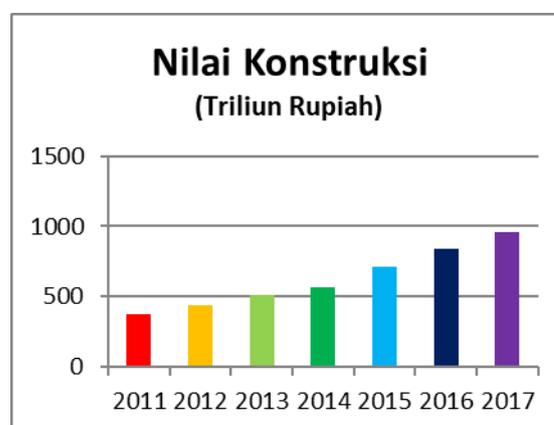
Perkembangan bisnis konstruksi dapat dilihat dari beberapa indikasi yang mengikutinya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya melakukan survey terkait sektor konstruksi sehingga dapat dilihat bagaimana kecenderungan bisnis konstruksi merespon kebijakan pemerintah diantaranya melalui pertumbuhan jumlah perusahaan konstruksi yang terdaftar di Indonesia. Trend yang terlihat, jumlah perusahaan konstruksi yang terdaftar di Indonesia cenderung menurun dari tahun 2012-2014, namun setelah di tahun-tahun berikutnya, jumlah perusahaan konstruksi ikut berkembang sejalan dengan bertambahnya alokasi biaya infrastruktur yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat menjadi indikasi yang baik tentang bagaimana bisnis konstruksi berkembang dengan adanya peningkatan jumlah alokasi biaya infrastruktur.



Gambar 3. Jumlah Perusahaan Konstruksi

#### 3.2.2 Nilai Bisnis Konstruksi

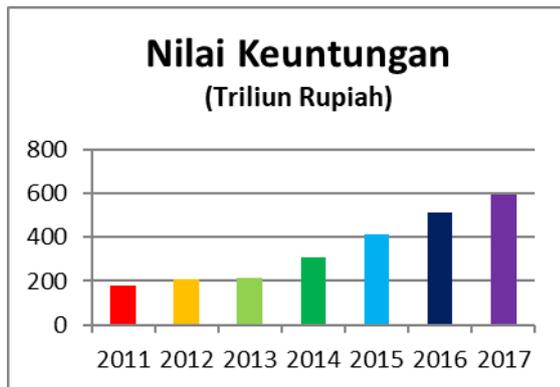
Sejalan dengan fenomena pertama, nilai konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengalami peningkatan yang signifikan.



Gambar 4. Nilai Konstruksi Indonesia

### 3.2.3 Nilai Keuntungan Konstruksi

Seperti yang tergambar pada chart dibawah ini, keuntungan yang didapatkan oleh industri konstruksi meningkat signifikan dari tahun 2014. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah memberikan dampak baik kepada sektor konstruksi. Namun demikian, perlu dianalisa lebih detail tentang bagaimana hasil dari kebijakan fiskal ini terhadap perkembangan kontraktor (bisnis konstruksi) terutama untuk kontraktor swasta.



Gambar 5. Nilai Keuntungan Konstruksi Indonesia

### 3.3 Detail Perkembangan Bisnis Konstruksi

Berdasarkan data jumlah paket pekerjaan tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR, dapat dilihat bahwa perkembangan bisnis konstruksi dari sudut pandang jumlah perusahaan, nilai konstruksi dan nilai keuntungan ternyata berimbang cukup positif terhadap kontraktor kecil dimana dari total paket pekerjaan yang disediakan, lebih dari 40% nya menjadi porsi dari kontraktor kecil. Namun demikian dengan banyaknya jumlah kontraktor kecil di Indonesia menyebabkan sulit kontraktor kecil untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan usahanya.

Tabel 2. Pembagian Paket Pekerjaan

Tahun	Jumlah paket pekerjaan	Nilai (T)	Porsi Kontraktor Kecil	Nilai (T)
2017	3935	77,86	3650	32,30
2018	4971	59,96	4776	31,77

Lebih lanjut, pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa dari sudut pandangan pembagian kontraktor

BUMN dan swasta, ditemukan bahwa kontraktor swasta hanya dominan di paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp.100 M meskipun jumlah paket pekerjaannya lebih dari 3000 paket.

Tabel 3. Porsi Paket Pekerjaan BUMN dan swasta

Nilai (M)	Jumlah paket pekerjaan	Nilai (T)	Porsi BUMN	Porsi Swasta
<50	3650	-	0%	100%
50-100	166	11,7	10%	90%
>100	119	33,9	65%	35%

### 3.4 Evaluasi

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintah karena berdasarkan kajian awal diatas terlihat bahwa sesungguhnya belum ada pemerataan pembagian paket pekerjaan antara kontraktor besar, kecil dan menengah baik itu BUMN maupun swasta. Belum ada kajian yang komperhensif mengenai hasil pembangunan infrastruktur dan terbatasnya data yang dipublikasikan menyebabkan terbatasnya lingkup kajian dan umpan balik yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai regulator untuk melakukan perbaikan.

Di sisi lain, perlu dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah untuk membuat bisnis konstruksi di Indonesia berkembang dengan merata melalui perbaikan regulasi terkait pembagian kualifikasi dan klasifikasi maupun mengarahkan kontraktor kecil menjadi kontraktor spesialis.

## 4. Kesimpulan dan Saran

Dampak dari meningkatnya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah terhadap bisnis konstruksi di Indonesia terlihat dengan meningkatnya nilai keuntungan yang diperoleh oleh bisnis konstruksi di Indonesia. Namun demikian dampak pertumbuhan yang diperoleh bisnis konstruksi belum dibagi secara merata dengan jumlah kontraktor yang sangat banyak. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur yang masih akan terus dilaksanakan oleh pemerintah akan semakin memberikan dampak positif terhadap bisnis konstruksi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Keuangan. (2019). APBN 2019. Retrieved from Kementerian Keuangan Web site: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses tanggal 17 November 2019
- [2] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik, 2018
- [3] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik, 2017
- [4] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik, 2016
- [5] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik, 2015
- [6] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2013, Badan Pusat Statistik, 2014
- [7] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik, 2013
- [8] Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik, 2012
- [9] Dinarjito, A, Menilai Kesehatan BUMN Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebagai Akibat Meningkatnya Proyek Infrastruktur Pemerintah, Substansi, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- [10] Rr. Lulus Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang, Jurnal Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, 82-103, Juni 2015.
- [11] Adasiha Arwan, Mukhammad Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 60 Nomor 3, 10-17, Juli 2018.
- [12] Farida Nur Hidayah, Kholis Roisah, Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1, 45-59, 2017.